

**PENGARUH CAPITAL INTENSITY, RISIKO PERUSAHAAN, KONEKSI  
POLITIK, LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX  
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN  
REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI  
PERIODE 2015-2018**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**MARIANO ANTONIO HASULIE**  
**2016310110**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2020**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Mariano Antonio Hasulie

Tempat, Tanggal Lahir : Maumere, 10 juni 1998

N.I.M : 2016310110

Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

J u d u l : Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Koneksi Politik, Leverage dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,

Tanggal .....

**(Dewi Murdiawati, SE.,MM)**

**NIDN.0716118204**

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal :

**(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M. Si., CA., CIBA., CMA)**

**NIDN. 0731087601**

**THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, COMPANY RISK, POLITICAL CONNECTION, LEVERAGE AND FOREIGN OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN PROPERTY COMPANIES AND REAL ESTATE LISTED ON THE IDX 2015-2018 PERIOD**

Mariano Antonio Hasulie  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [2016310110@students.perbanas.ac.id](mailto:2016310110@students.perbanas.ac.id)

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze capital intensity, company risk, leverage, political connection and Foreign Ownership to tax avoidance. The subjects of this research are Property and Real Estate companies in 2015-2018. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression using SPSS 23.0. The results of this study explain that Capital Intensity, political connection and Foreign Ownership have no effect on tax avoidance, but corporate risk and leverage have effect on tax avoidance.

**Keywords: Tax Avoidance, Capital Intensity, Company Risk, Leverage, Political Connection**

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar yang dimiliki negara dan merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessmentsystem*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Burton dan Ilyas, 2010).

Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penerimaan pajak 2013-2017, penerimaan pajak setiap tahun tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan, dalam praktiknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif dibagi dalam beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax evasion* dan *tax avoidance*.

*Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan sebagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah atau biasa dikenal sebagai penggelapan pajak sedangkan *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau peminimalan pajak yang masih tidak keluar dari ranah hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang – undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Pajak menurut perusahaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan, karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Di lihat dari pandangan fiskus, pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Kedua sisi tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan menginginkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya dari masyarakat, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara.

Terdapat fenomena mengenai kasus *tax avoidance* pada sektor properti dan real estate di Indonesia. Berdasarkan penelitian awal Ditjen Pajak, ada potential *loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk properti real estate dan apartemen (Hendrik Maulana,2017).

Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau riil. Padahal potensi penerimaan pajak dari sektor properti dan real estate berasal dari pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10% sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Berdasarkan penjabaran latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diberi judul “ Pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Koneksi Politik Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015-2018.

## **KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Agency Theory**

Hendriksen dan Breda (1992:206) juga menjelaskan di dalam buku *Accounting Theory*, bahwa teori keagenan (*agency theory*), atau yang juga biasa disebut dengan teori prinsipal adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan *agents*. Dalam teori agensi, agen melakukan tugasnya bagi prinsipal, dan prinsipal memberikan *reward* bagi agen tersebut.

Teori agensi (*agency theory*) adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh satu atau lebih principal dengan melibatkan orang lain sebagai agen untuk melaksanakan beberapa perintah dari prinsipal dimana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dari definisi teori agensi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh

prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai yang menjalankan perusahaan dimana didalamnya terdapat pendelegasian wewenang kepada agen.

Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidak-seimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu – individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan ketidak-seimbangan informasi yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang tidak seimbang tersebut, agen dapat mempengaruhi angka – angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. Pengertian (*asymmetrical information*) itu sendiri adalah adanya tidak seimbangan informasi yang diberikan manajemen selaku subjek pemegang amanat yang menjalankan secara langsung kegiatan operasional perusahaan terhadap para pemegang saham (*principal*). Asimetri informasi dapat menimbulkan biaya agency yang dikeluarkan oleh para pemegang saham (shareholders) dalam rangka mengawasi kinerja manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam 2

bentuk hubungan, yaitu; (1) antara pemegang saham dan manajer, dan (2) antara pemegang saham dan kreditor. Jika suatu perusahaan berbentuk perusahaan perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka dapat diasumsikan bahwa manajer-pemilik tersebut akan mengambil setiap tindakan yang mungkin, untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi, jika manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka pertentangan kepentingan bisa segera timbul. Keadaan ini menjadikan manajer mungkin saja tidak sedemikian gigih lagi untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang sesuai dengan pengurangan kepemilikan mereka. Atau mungkin saja manajer menetapkan gaji yang besar bagi dirinya atau menambah fasilitas eksekutif, karena sebagian di antaranya akan menjadi beban pemegang saham lainnya.

Hubungan dari adanya teori keagenan dengan perilaku penghindaran pajak yaitu pada teori keagenan terdapat manajer yang mengelola perusahaan dimana seorang manajer disini menginginkan laba yang tinggi namun pembayaran

pajak lebih rendah, sedangkan pemegang saham menghindari perilaku penghindaran pajak karena perilaku ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan

#### Tax Avoidance

Menurut Pohan (2013:14) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* dilakukan untuk berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya untuk meminimalkan beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari, 2017). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan *profitabilitas* dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran

pajak, jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan *profitabilitas*, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat memengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial.

#### Capital Intensity

*Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Menurut Waluyo dan Kearo (2002) dalam Octaviana (2014) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan., aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari

penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak Perusahaan.

#### Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Menurut Fitri Damayanty dan Tridahus Susanto (2015) risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang

direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada.

Risiko perusahaan merupakan cerminan dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai karakter *risk taker* merupakan eksekutif yang lebih berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mempunyai pendapatan, posisi, kesejahteraan, dan kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis merupakan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse*. Jika mendapatkan peluang maka *risk averse* akan memiliki risiko yang lebih rendah.

Oleh karena itu, karakter eksekutif tercermin dari risiko perusahaan (*corporate risk*), sebab kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Jika risiko perusahaan makin tinggi

maka eksekutif mempunyai karakter *risk taker*, dan Begitu Sebaliknya.

### Leverage

Menurut Melisa Fadila (2017) *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage* (Martono dan Harjito, 2010). *Operating leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya operasi tetap untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap *earning before interest and taxes* (EBIT) (Syamsuddin, 2007:107). *Financial leverage* merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan. *Financial leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan



gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang.

*Leverage* ini menjadi salah satu sumber pendanaan perusahaan yang di dapat dari pihak eksternal dengan melalui hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

#### Koneksi Politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008 adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan (kegiatan), sedangkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017).

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD (Mamlu Atul Munawaroh dan Rmamdany, 2019).

Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik.

Koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara salah satu pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil.

Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah (2017) juga menemukan bahwa faktor koneksi politik lebih kentara jika sebuah negara mempunyai level korupsi yang

tinggi, terlebih di Indonesia, negara yang menurut Sudibyo dan Jianfu (2015) memiliki kelemahan *institutional environment*. Korupsi merupakan isu yang serius menurut survey yang diselenggarakan oleh *Transparency International*. Hal ini didukung dengan skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang berada di bawah rata-rata skor CPI global walaupun dalam 5 tahun, indeks CPI terus mengalami kenaikan. Indonesia berada di angka 36 dengan menempati urutan ke-88 dari 168 negara di bawah rata-rata global (43) dan masih kalah dengan Thailand (76), Malaysia (54), dan Singapura (8). Sektor politik dan perizinan memberikan hambatan yang besar dalam kenaikan indeks CPI sehingga memberikan sinyal bahwa sebenarnya praktek korupsi masih dipersepsikan biasa dilakukan di pemerintahan (Transparency International, 2015). Menurut Sudibyo dan Jianfu (2016), eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC).

Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit perlindungan terhadap aturan preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah dalam kesulitan keuangan (Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah, 2017), adanya akses terhadap legislasi, dan

kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik (Kim dan Zhang, 2016), kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara finansial/*corporate bail out*, preferensi dalam mendapatkan *import licences* sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan pengurangan sanksi pajak. Adanya kemudahan tersebut menjadi landasan positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti pengawasan yang longgar dan rendahnya *probability of detection* dalam pemeriksaan pajak seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### Kepemilikan Asing

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau

lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Investor menanamkan dananya pada sebuah perusahaan tentu berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Pemegang saham pengendali asing ini bisa memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan untuk mendapatkan keuntungan.

Kepemilikan asing dapat melalui investasi, *joint ventures*, merger, dan akuisisi atau kepemilikan ekuitas. Kepemilikan asing atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan asing diinginkan bagi kebanyakan negara berkembang untuk mencari dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cepat karena kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, nilai saham yang kuat, dan pengungkapan sukarela yang tinggi.

Menurut Conklin (1997) apabila kepemilikan kurang atau lebih dari 49 persen ditetapkan, orang asing dapat dikalahkan oleh pemegang saham domestik dalam menentukan posisi korporasi dan membuat keputusan kepentingan

ekonomi dan politik dalam negeri. Kepemilikan tidak terikat secara tepat dengan pengendalian didalamnya, kepemilikan saham mungkin tidak mencerminkan struktur pengambilan keputusan. Subjek tata kelola perusahaan menunjukkan kompleksitas hubungan kepemilikan dan keputusan perusahaan. Proporsi saham asing yang tinggi pada suatu perusahaan, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Disisi lain pemerintah menginginkan investor asing yang masuk ke Indonesia selain menanam modalnya, mereka juga akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Investor asing memilih untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan lokal, mereka akan menginginkan tingkat pengembalian yang sesuai diharapkan oleh mereka. Secara tidak langsung investor asing ikut andil dalam menentukan kebijakan di dalam perusahaan agar memperoleh laba yang tinggi agar deviden yang dibayarkan juga tinggi, penentuan kebijakan ini akan mengarah salah satunya pada meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

*Capital Intensity* yang merupakan kepemilikan perusahaan atas aset tetap yang mengakibatkan besarnya biaya depresiasi aset tetap serta mengurangi laba sebelum pajak. Kepemilikan aset tetap dapat

mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil.

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda dimana di dalam memutuskan untuk berinvestasi atau membeli aset tetap, wewenang bisa dilakukan antara pemangku kepentingan (pemilik) atau oleh manajemen (agen). Dalam memutuskannya dapat timbul konflik antara pemangku kepentingan dengan manajemen karena pemangku kepentingan cenderung berhati-hati karena aset tetap nilainya tidak kecil, sedangkan manajemen menginginkan dapat lebih banyak besar di dalam pembelian aset tetap karena depresiasi dalam aset tetap dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dr. Bambang Setyobudi Irianto (2017) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pajak sebagai akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahun. Metode penyusutan aset didorong oleh undang-undang pajak, bahwa biaya penyusutan dapat dikurangi pada penghasilan sebelum pajak.

Informasi lebih lanjut dalam penelitian Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan aset tetap tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, oleh karena itu tarif pajak efektifnya rendah.

H1: *Capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. *Corporate risk* (Resiko perusahaan) adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Oleh karena itu dengan mengetahui akan adanya risiko yang ada, perusahaan mampu mencegah resiko tersebut dengan mengidentifikasi untuk menstabilkan kinerja mereka, sehingga mampu untuk memenuhi target, meminimalisir kegagalan dalam perusahaan dan mampu menciptakan sebuah peluang bisnis yang menguntungkan.

Low (2006) mendefinisikan seorang pemimpin bisa saja memiliki dua karakter yaitu *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan, semakin tinggi risiko suatu perusahaan maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*, sebaliknya semakin rendah risiko suatu perusahaan maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taking* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* tidak akan takut ketika membuat keputusan yang berisiko tinggi. Semakin berani eksekutif melakukan risiko maka semakin tinggi eksekutif tersebut melakukan *tax avoidance*.

Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi, karena mereka termotivasi untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Dewi, 2013). Jadi semakin tinggi risiko perusahaan maka karakter *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu mereka akan terus berusaha mendatangkan aliran kas yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan, dengan cara melakukan pembiayaan hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut. Budiman dan

Setiyono (2012) menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) seringkali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Budiman dan Setiyono (2012) serta Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh pada *tax avoidance*. Dyreng, Michelle and Edward (2010) menguji pengaruh individu top executive terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di ExecuComp diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan pemegang saham membuat terjadinya masalah keagenan. Di satu sisi eksekutif menginginkan laba semaksimal mungkin tetapi dengan pembayaran pajak yang kecil dan pemegang saham menginginkan membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan. Adanya perbedaan tersebut tentu saja dikarenakan karakter yang berbeda-beda tiap eksekutifnya.

H2: Risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya

(Melisa Fadila, 2017). Adanya biaya bunga yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga pemakaian kredit perusahaan dapat dipakai sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan pajak, sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah.

*Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan (Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ, 2016 ). Permasalahan *leverage* akan selalu dihadapi oleh perusahaan, bila perusahaan tersebut menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasi maupun biaya finansial.

Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat

dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Jadi, beban atau biaya tetap sebenarnya merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan keuangan. Besar kecilnya risiko tersebut perlu diketahui agar dapat diantisipasi dengan meningkatkan volume kegiatan usaha.

Bila hutang yang dimiliki perusahaan tinggi dan nilai ETR nya rendah berarti *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sebaliknya. *leverage* yang tinggi dan nilai ETR rendah (perusahaan mengurangi beban pajak), berarti perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*, artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* dan nilai ETR tinggi berarti *leverage* tidak terpengaruh terhadap *tax avoidance* ( Tri Astuti dan Sri Ambarwati, 2020).

Dalam teori keagenan, investor (principal) mempunyai modal untuk digunakan manajemen (agen) untuk melakukan operasional perusahaan sehingga investor mengharapkan tingkat hutang tidak terlalu tinggi supaya tingkat pembayaran bunga tidak terlalu tinggi. Namun manajemen (agen) lebih menginginkan tingkat hutang yang tinggi agar dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu cara untuk meminimalkan pembayaran pajak terhutang karena akan dinaikkan biaya bunga dan akan mengurangi laba perusahaan, dan ETR akan lebih rendah. Ketika perusahaan lebih

mengandalkan pembiayaan utang dari pembiayaan daripada ekuitas untuk operasi, perusahaan akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Ini karena perusahaan yang memiliki tingkat utang lebih tinggi, mereka akan membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Itu membuat nilai tarif pajak efektif menjadi lebih rendah.

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017). Memiliki koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Mamlu

Atul Munawaroh dan Ramdany, 2019).

Berdasarkan teori keagenan petinggi perusahaan selaku principal yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau partai politik berusaha untuk mendapatkan kepercayaan lebih bahwa perusahaan yang dipimpinnya selalu mematuhi peraturan dan regulasi pajak yang di berikan pemerintah, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi penilaian dari pemerintah terhadap perusahaan. maka dari itu petinggi perusahaan tidak serta merta menggunakan hubungannya dengan pemerintah atau partai politik untuk melakukan penghindaran pajak karena. Akan tetapi manajemen sebagai pihak agen menggunakan hubungan politik tersebut sebagai sumber yang sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terkoneksiya perusahaan dengan politik dipercaya dapat menghindari pemeriksaan pajak, sehingga memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba.

H4: Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Kepemilikan asing di suatu

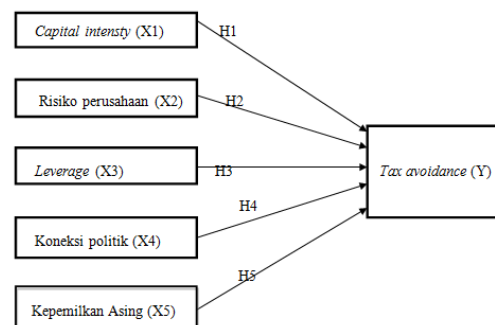
perusahaan semakin tinggi maka akan memiliki wewenang atau kendali yang semakin besar juga.

Hubungannya terhadap penghindaran pajak terletak pada wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham asing, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan untuk melakukan *tax avoidance*.

Agensi teori menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) perusahaan, dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk mengambil keputusan terkait permasalahan yang timbul dalam suatu perusahaan. Hal tersebut menimbulkan *assymetry information* yang memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka memperkecil beban pajaknya.

H5: Kepemilikan asing berpengaruh *tax avoidance*.

Kerangka penelitian yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



## METODE PENELITIAN

### Rancangan penelitian

Berdasarkan paradigma riset, riset ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penekanan pada pengujian teori-teori yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran data penelitian berupa angka-angka dan analisis statistik (Sugiyono, 2014: 13). Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian dasar. Penelitian dasar adalah penelitian berdasarkan pada teori dan fenomena dari penelitian terdahulu (Sugiyono, 2014: 12).

Rancangan pada penelitian ini menggunakan data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip ( data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang atau lewat perantara lain yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014: 224). Data sekunder dari penelitian ini didapat dari laporan keuangan perusahaan properti dan real estate



yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

### Batasan Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan yang di uraikan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi. Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan agar lebih fokus dalam hal yang diteliti. Batasan pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan *property and real estate* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2015 hingga 2019.
2. Variabel yang digunakan yaitu *capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, kepemilikan asing dan *tax Avoidance*.

### Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Variabel dependen : *tax avoidance*.
- b. Variabel independen : *Capital Intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik dan kepemilikan asing.

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel *Tax avoidance* (Y)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan,

2013:13). Menurut Dyreng, Scott, Hanlon, Michelle dan Edward (2010), variabel ini dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, Penggunaan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai pengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak baik beda tetap maupun beda temporer. Menurut ((Fitria Damayanti dan Tridahus Susanto, 2015) hasil CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) berkurang, sebaliknya jika hasil CETR (*Cash Effective Tax Rate*) menurun maka tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) meningkat. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

### *Capital Intensity* (X1)

*Capital Intensity* yang merupakan kepemilikan perusahaan atas aset tetap yang mengakibatkan besarnya biaya depresiasi aset tetap serta mengurangi laba sebelum pajak. Semakin besar *capital Intensity* yang dimiliki perusahaan atas aset tetap mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayar berkurang.

*Capital intensity* ini dihitung melalui total aset tetap bersih dibagi

dengan total aset perusahaan (Tri astuti dan Sri ambarwati, 2020).

$$CAPIN = \frac{TOTAL\ ASET\ TETAP\ BERSIH}{TOTL\ ASET}$$

### Risiko Perusahaan (X2)

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, 2015).

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taking* atau *risk averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

Risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan (Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto, 2015).

$$Risk = \frac{EBITDA}{TOTAL\ ASET\ PERUSAHAAN}$$

### Leverage (X3)

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga tinggi kepada kreditur, yang

akan mengurangi laba maka akan mengurangi beban pajak (Tri astuti dan Sri ambarwati, 2020). Bila hutang yang dimiliki perusahaan tinggi dan nilai CETR nya rendah berarti *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sebaliknya. *Leverage* yang tinggi dan nilai CETR rendah (perusahaan mengurangi beban pajak), berarti perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*, artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* dan nilai CETR tinggi berarti *leverage* tidak terpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan rasio total utang terhadap total aset (Melisa Fadila, 2017).

$$LEV = \frac{TOTAL\ LIABILITAS}{TOTAL\ ASET}$$

### Koneksi Politik (X4)

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017). Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah jika terdapat pemilik saham (seseorang yang memiliki 10% kepemilikan dari total saham dengan hak suara) maupun pemimpin perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, dan sekretaris) yang merupakan orang yang memiliki hubungan khusus dengan politisi

pada partai politik atau pemerintahan.

Untuk variabel koneksi politik, dijelaskan dengan variabel dummy, yang diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *political connection* mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Mamlu Atul Munawaroh et al (2019) yaitu:

- a. Jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik,
- b. Jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,
- c. Jika ada salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

#### **Kepemilikan Asing (X5)**

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal

asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing.

Menurut (Irzalina nur dan Agus purwanto, 2017) kepemilikan asing dilambangkan dengan FOROWN, dengan penghitungan :

$$\text{FOROWN} = \frac{\text{TOTAL SAHAM YANG DIMILIKI ASING}}{\text{SAHAM YANG BEREDAR}} \times 100\%$$

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif**

Merupakan suatu metode dalam menganalisis data kuantitatif sehingga diperoleh gambaran atau deskripsi suatu data (Imam Ghazali, 2011 : 19). Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang variabel dependen, yaitu *tax avoidance*; variabel independen, yaitu *capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing.

## Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	136	.00	5.93	.3358	.72410
Capital Intersity	136	.00	.70	.0765	.11588
Risiko Perusahaan	136	.01	3.30	.1149	.29500
Leverage	136	.04	3.36	.4076	.31595
Koneksi Politik	136	.00	1.00	.1397	.34796
Kepemilikan Asing	136	.00	7.21	.2674	.87850
Valid N (listwise)	136				

### Tax Avoidance (CETR)

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13). Menurut Dyreng, Scott, Hanlon, Michelle dan Edward (2010), variabel ini dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Penggunaan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sebagai pengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak baik beda tetap maupun beda temporer. Menurut ((Fitria Damayanti dan Tridahus Susanto, 2015) hasil CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) berkurang, sebaliknya jika hasil CETR (*Cash Effective Tax Rate*) menurun maka tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) meningkat.

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 136 sampel data. Nilai rata-rata dari variabel *tax avoidance* adalah 0.3358 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.72410. Nilai rata-rata *tax avoidance* tertinggi adalah 5.93 dan nilai rata-rata *tax avoidance* terendah adalah 0.00. Nilai rata-rata dari variabel *tax avoidance* lebih kecil dari nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel *tax avoidance* mempunyai sebaran data yang bersifat heterogen dengan nilai koefisien variasi sebesar 2.156 yang diperoleh dari  $0.72410/0.3358$ .

### Capital Intensity (CAPIN)

*Capital Intensity* yang merupakan kepemilikan perusahaan atas aset tetap yang mengakibatkan besarnya biaya depresiasi aset tetap serta mengurangi laba sebelum pajak. Semakin besar *capital Intensity* yang dimiliki perusahaan atas aset tetap mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayar berkurang.

Nilai rata-rata dari variabel *capital intensity* adalah 0.0765 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.11588. Nilai rata-rata *capital intensity* tertinggi adalah 0.70 dan nilai rata-rata intensitas modal terendah adalah 0.00. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel intensitas modal mempunyai

sebaran data yang bersifat homogen dengan nilai koefisien variasi sebesar 1.51477 yang diperoleh dari 0.11588/0.0765.

### **Resiko Perusahaan (RISK)**

Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi *earning* perusahaan mengidentifikasi semakin besar pula risiko perusahaan yang ada (Fitri Damayanti dan Tridahu Susanto, 2015).

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk taking* atau *risk averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

Risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan (Fitri Damayanti dan Tridahu Susanto, 2015).

Nilai rata-rata dari variabel risiko perusahaan adalah 0.1149 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.295. Nilai rata-rata Risiko Perusahaan tertinggi adalah 3.30 dan nilai rata-rata Risiko

Perusahaan terendah adalah 0.01. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel Risiko Perusahaan mempunyai sebaran data yang bersifat homogen dengan nilai koefisien variasi sebesar 2.56 yang diperoleh dari 0.295/0.1149.

### **Leverage (LEV)**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Melisa Fadila, 2017). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Beban bunga yang muncul dari kepemilikan utang pada perusahaan dapat dijadikan pengurang laba perusahaan. Hal ini menjadikan berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Nilai rata-rata dari variabel *leverage* adalah 0.4076 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.31595. Nilai *leverage* tertinggi adalah 3.36 dan nilai *leverage* terendah adalah 0.04. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel *leverage* mempunyai sebaran data yang bersifat heterogen dengan nilai koefisien variasi sebesar 0.77515 yang diperoleh dari 0.31595/0.4076.

#### **Koneksi Politik (KP)**

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD (Mamlu Atul Munawaroh dan Rmamdany, 2019).

Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik.

Koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara salah satu

pemegang saham besar atau salah satu pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik. Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil.

Nilai rata-rata dari variabel koneksi politik adalah 0.1397 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.34796. Nilai koneksi politik tertinggi adalah 1 dan nilai koneksi politik terendah adalah 0. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel koneksi politik mempunyai sebaran data bersifat homogen dengan nilai koefisien variasi sebesar 2.49 yang diperoleh dari 0.34796/0.1397.

#### **Kepemilikan Asing (FOROWN)**

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri

(Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing.

Nilai rata-rata dari variabel kepemilikan asing adalah 0.2674 dengan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 0.8785. Nilai kepemilikan asing tertinggi adalah 7.21 dan nilai kepemilikan asing terendah adalah 0. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata, maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam variabel kepemilikan asing mempunyai sebaran data yang bersifat homogen dengan nilai koefisien variasi sebesar  $3.285 / 0.2674$  yang diperoleh dari  $0.8785 / 0.2674$ .

## ANALISA Uji ASUMSI KLASIK

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		136
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22191697
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		1.229
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji one

sample kolmogorov smirnov (KS). Pengujian ini dilakukan tujuan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak secara statistic. Data dikatakan terdistribusi normal bila nilai signifikan dari pengujian one-sample kolmogorov smirnov lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  (0.05).

### Uji Normalitas

Dari hasil pengujian one sampel kolmogorov smirnov (KS), terlihat bahwa residual memiliki distribusi tidak normal karena memiliki Asymp Sig (0.097) lebih dari  $\alpha = 5\%$  (0.05) yang berarti residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai VIF jika lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Berdasarkan hasil uji kolinieritas ganda atau uji Variance Influence Faktor (uji VIF) diperoleh nilai VIF pada masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Capital Intensity	0,364	1,405	Tidak terjadi multikolinearitas
Risiko Perusahaan	0,902	1,109	Tidak terjadi multikolinearitas
Leverage	0,866	1,155	Tidak terjadi multikolinearitas
Koneksi Politik	0,944	1,060	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepemilikan Asing	0,875	1,143	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Lampiran Output SPSS, diolah

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 4.4 hasil menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.



Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel *capital intensity* (CAPIN), resiko perusahaan (RISK), *leverage* (LEV), koneksi politik (KP) dan kepemilikan asing (FOROWN) tidak terjadi korelasi sehingga model regresi sudah baik.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi sudah baik.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pada periode *t-1* (periode sebelumnya). Uji Durbin Watson (DW Test) hanya digunakan autokorelasi satu tingkat dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan

tidak ada variabel lag di antara variabel independen.

**Tabel 4.5**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.498 <sup>a</sup>	.248	.219	.22614	1.474

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Risiko Perusahaan, Koneksi Politik, Leverage, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4.5 terdapat nilai durbin watson sebesar 1,474 maka dapat disimpulkan nilai dw berada di antara  $-2 < DW < 2$ . artinya tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *capital intensity*, resiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Berikut ini adalah hasil pengolahan data regresi linear berganda menggunakan program SPSS

**Tabel 4.6**

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t hitung	Sig
	B	Std. Error		
Constant	0.261	0.053	4.917	0.000
<i>Capital Intensity</i> (X <sub>1</sub> )	0.301	0.331	0.911	0.364
Risiko Perusahaan (X <sub>2</sub> )	-2.537	0.463	-5.475	0.000
<i>Leverage</i> (X <sub>3</sub> )	0.341	0.112	3.038	0.003
Koneksi Politik (X <sub>4</sub> )	-0.057	0.058	-0.988	0.325
Kepemilikan Asing (X <sub>5</sub> )	0.029	0.024	1.219	0.225
R	= 0.498		R Square	= 0.248
F <sub>hitung</sub>	= 8.556		Sig.	= 0.000

Sumber: Lampiran 5, Data Diolah



Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TA = 0.261 + 0.301 CI - 2.537 RP + 0.341 LEV - 0.057 KP + 0.029 KA + e_i$$

Interprestasi dari model regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta ( $\beta_0$ ) sebesar 0.261 menunjukkan bahwa apabila variabel bebas = 0 maka variabel terikat sebesar 0.261.
2. Nilai koefisien *Capital Intensity* ( $\beta_1$ ) sebesar 0.301 menunjukkan bahwa jika variabel *Capital Intensity* ditingkatkan, maka akan mengakibatkan peningkatan tax avoidance sebesar 0.301, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien Risiko Perusahaan ( $\beta_2$ ) sebesar -2.537 menunjukkan bahwa jika variabel Risiko Perusahaan ditingkatkan, maka akan mengakibatkan penurunan tax avoidance sebesar 2.537, dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai koefisien *Leverage* ( $\beta_3$ ) sebesar 0.341 menunjukkan bahwa jika variabel *Leverage* ditingkatkan, maka akan mengakibatkan peningkatan tax avoidance sebesar 0.341, dengan asumsi variabel lain konstan.

5. Nilai koefisien Koneksi Politik ( $\beta_4$ ) sebesar -0.057 menunjukkan bahwa jika variabel Koneksi Politik ditingkatkan, maka akan mengakibatkan penurunan tax avoidance sebesar 0.057, dengan asumsi variabel lain konstan.

Nilai koefisien Kepemilikan Asing ( $\beta_5$ ) sebesar 0.029 menunjukkan bahwa jika variabel Kepemilikan Asing ditingkatkan, maka akan mengakibatkan peningkatan tax avoidance sebesar 0.029, dengan asumsi variabel lain konstan.

### Analisa Hipotesis

#### Uji F

Uji serentak (uji F) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, leverage, koneksi politik, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax avoidance (Y).

**Tabel 4.7**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.188	5	.438	8.556	.000 <sup>a</sup>
	Residual	6.648	130	.051		
	Total	8.836	135			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Risiko Perusahaan, Koneksi Politik, Leverage, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

### HASIL PERHITUNGAN UJI F

Langkah-langkah pengujian :

#### 1. Hipotesis

$H_0$  :  $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$  artinya variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ , dan  $X_5$  tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

$H_a$  :  $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$  artinya variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$ , dan  $X_5$  memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y).

2. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika  $\text{Sig.} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak (tidak ada pengaruh secara bersama variabel bebas terhadap variabel terikat)

3. Kesimpulan

Karena nilai signifikan uji F ( $0.000$ ) < level alpha sebesar  $0,05$ , maka  $H_0$  ditolak pada tingkat signifikansi  $5\%$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel bebas (*capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Y (*tax avoidance*).

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.498 <sup>a</sup>	.248	.219	.22614

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Risiko Perusahaan, Koneksi Politik, Leverage, Capital Intensity

## Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

### Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa erat hubungan antara variabel bebas (*Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing) dengan *tax avoidance*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, *leverage*, koneksi

politik, dan kepemilikan asing dengan variabel *tax avoidance* adalah sedang yang ditunjukkan dengan nilai  $0.498$ .

Nilai koefisien determinasi atau  $R^2$  digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tak bebas atau variabel terikat (Y) yaitu variabel *tax avoidance*. Hasil dari perhitungan diperoleh nilai  $R^2 = 0.248$  yang berarti bahwa sebesar  $24.8\%$  *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing. Sedangkan sisanya  $75.2\%$  dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

### Uji T (Uji Parsial)

Untuk menguji hipotesis digunakan uji t yang menunjukkan pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (tak bebas). Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh variabel bebas yang terdapat pada model yang terbentuk untuk mengetahui apakah variabel bebas (x) yang ada dalam model secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (y).

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.261	.053		4.917	.000			
Capital Intensity	.301	.331	.082	.911	.364	.074	.080	.069
Risiko Perusahaan	-2.537	.463	-.439	-5.475	.000	-.382	-.433	-.417
Leverage	.341	.112	.248	3.038	.003	.220	.257	.231
Koneksi Politik	-.057	.058	-.077	-.988	.325	-.068	-.086	-.075
Kepemilikan Asing	.029	.024	.099	1.219	.225	.142	.106	.093

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

**Tabel 4.9**

**HASIL PERHITUNGAN UJI T**

**1. Uji parsial pengaruh *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance***

a. Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh yang signifikan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*

b. Dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat)

d. Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai tingkat signifikan sebesar 0.364, dimana tingkat signifikan lebih dari level alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

**2. Uji parsial pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *tax avoidance***

a. Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan Risiko Perusahaan terhadap *tax avoidance*

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh yang signifikan Risiko

Perusahaan terhadap *tax avoidance*

b. Dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat)

d. Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai tingkat signifikan sebesar 0.000, dimana tingkat signifikan kurang dari level alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial Risiko Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

**3. Uji parsial pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance***

a. Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan *leverage* terhadap *tax avoidance*

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh yang signifikan *leverage* terhadap *tax avoidance*

b. Dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (ada pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat)

d. Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai tingkat signifikan sebesar 0.003, dimana tingkat signifikan kurang dari level alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y).

**4. Uji parsial pengaruh koneksi politik terhadap tax avoidance**

a. Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan koneksi politik terhadap tax avoidance

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh yang signifikan koneksi politik terhadap tax avoidance

b. Dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat)

d. Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai tingkat signifikan sebesar 0.325, dimana tingkat signifikan lebih dari level alpha

sebesar 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y).

**5. Uji parsial pengaruh Kepemilikan Asing terhadap tax avoidance**

a. Perumusan Hipotesis

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan Kepemilikan Asing terhadap tax avoidance

$$H_1 : \beta_5 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh yang signifikan Kepemilikan Asing terhadap tax avoidance

b. Dengan nilai  $\alpha$  sebesar 0,05

c. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika Sig. < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat)

d. Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS didapatkan nilai tingkat signifikan sebesar 0.225, dimana tingkat signifikan lebih dari level alpha sebesar 0,05, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara parsial Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Y).

**Tabel 4.10**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Hipotesis	Sig	T	Kesimpulan	Keterangan
1	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	0,364	0,911	H0 diterima	Tidak Berpengaruh
2	Risiko perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	0,000	-5,475	H0 ditolak	Berpengaruh
3	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	0,003	3,038	H0 ditolak	Berpengaruh
4	Koneksi politik berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	0,325	-0,988	H0 diterima	Tidak Berpengaruh
5	Kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	0,225	1,219	H0 diterima	Tidak Berpengaruh

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisa regresi linear berganda dari nilai perolehan persamaan regresi model diketahui bahwa variable *capital intensity*, *leverage* dan kepemilikan asing menunjukkan nilai koefisien regresi positif, hal tersebut menunjukkan adanya arah positif atau hubungan searah dari variabel *capital intensity*, *leverage* dan kepemilikan asing dengan *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa jika semakin meningkat *capital intensity*, *leverage* dan kepemilikan asing maka *tax avoidance* akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin menurun *capital intensity*, *leverage* dan kepemilikan asing maka *tax avoidance* akan semakin menurun. Variabel risiko perusahaan dan koneksi politik menunjukkan nilai koefisien regresi negatif, hal tersebut menunjukkan adanya arah negatif atau hubungan tidak searah dari variabel risiko perusahaan dan koneksi politik dengan *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa jika semakin meningkat risiko

perusahaan dan koneksi politik maka *tax avoidance* akan semakin menurun, begitu pula sebaliknya jika semakin menurun risiko perusahaan dan koneksi politik maka *tax avoidance* akan semakin meningkat.

Hasil analisis menunjukkan variabel bebas yang meliputi *capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing bersama-sama (secara simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu *tax avoidance* (Y), karena mempunyai nilai probabilitas di bawah 0.05. Seluruh variabel independen atau variabel bebas berpengaruh atau dapat menjelaskan variasi dari variabel terikat sebesar 24.8%. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.248 dari hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program statistik SPSS seperti dalam Lampiran 5, sedangkan sisanya yaitu 75.2% adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Angka koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan keterikatan antara variabel bebas *capital intensity*, risiko perusahaan, *leverage*, koneksi politik, dan kepemilikan asing secara bersama-sama dengan *tax avoidance* (Y) sedang karena menunjukkan angka sebesar 0.498.

## Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

*Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan

persediaan. Menurut Waluyo & Kearo (2002) dalam Nyoman Budhi Setya Dharma & Naiek Noviari (2017) intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah.

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan berbeda dimana di dalam memutuskan untuk berinvestasi atau membeli aset tetap, wewenang bisa dilakukan antara pemangku kepentingan (pemilik) atau oleh manajemen (agen). Dalam memutuskannya dapat timbul konflik antara pemangku

kepentingan dengan manajemen karena pemangku kepentingan cenderung berhati-hati (*conservative*) karena aset tetap nilainya tidak kecil, sedangkan manajemen menginginkan dapat lebih banyak besar di dalam pembelian aset tetap karena depresiasi dalam aset tetap dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil pengujian statistik *t* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.364 lebih besar sama dengan 0,05 selain itu nilai dari  $\beta$  menunjukkan angka negatif yakni sebesar 0.301. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman *et. al.* (2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh.

Namun penelitian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tri Astuti & Sri Ambarwati (2020) yang mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Paligovora (2010) dalam Fitri & Tridatus (2015) menyatakan bahwa risiko perusahaan merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. Risiko perusahaan merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki *risk averse* (Fitri & Tridatus, 2015). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak maka

terjadi hubungan yang lurus antara risiko dengan penghindaran pajak. Semakin besar risiko semakin besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak yang menandakan bahwa eksekutif adalah seorang *risk taker*, begitu juga sebaliknya.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif (agen) dan pemegang saham (principal) membuat terjadinya masalah keagenan. Di satu sisi eksekutif menginginkan laba semaksimal mungkin tetapi dengan pembayaran pajak yang kecil dan pemegang saham menginginkan membayar pajak sesuai dengan laba yang dihasilkan. Adanya perbedaan tersebut tentu saja dikarenakan karakter yang berbeda-beda tiap eksekutifnya.

Hasil pengujian statistik *t* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil sama dengan 0,05 selain itu nilai dari  $\beta$  menunjukkan angka negatif yakni sebesar -2.537. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko yang lebih besar mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker*, dimana eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi, karena mereka termotivasi untuk mendapatkan

tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Dewi, 2013).

Hasil ini tidak mendukung penelitian Tryas *et. al.*(2019) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri Damayanti & Tridahus Susanto (2015) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance**

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Melisa Fadila, 2017). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Beban bunga yang muncul dari kepemilikan utang pada perusahaan dapat dijadikan pengurang laba perusahaan. Hal ini menjadikan berkurangnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka semakin tinggi

tingkat hutang yang dimiliki perusahaan akan memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan, investor (principal) mempunyai modal untuk digunakan manajemen (agen) untuk melakukan operasional perusahaan sehingga investor mengharapkan tingkat hutang tidak terlalu tinggi supaya tingkat pembayaran bunga tidak terlalu tinggi. Namun manajemen (agen) lebih menginginkan tingkat hutang yang tinggi agar dapat melakukan penghindaran pajak melalui pembayaran hutang.

Hasil pengujian statistik *t* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.003 lebih kecil sama dengan 0,05 selain itu nilai dari  $\beta$  menunjukkan angka positif yaitu sebesar 0.341. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya biaya bunga yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga pemakaian kredit perusahaan dapat dipakai sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan pajak, sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang



besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah.

Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tri Astuti & Sri Ambarwati (2020) dan Melisa Fadila (2017) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian ini berbanding lurus dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Marfirah & Fazli Syam (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Melisa Fadila, 2017). Memiliki koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Sulitnya mendapat investor sebagai penyandang dana tidak menjadi masalah besar bagi perusahaan. Koneksi politik membuat perusahaan mudah mendapatkan pinjaman dengan batas kredit yang bisa diperpanjang. Hal ini terjadi karena pemberi pinjaman juga memperoleh dukungan ekonomi langsung dari

pemerintah dimana perusahaan terhubung serta adanya jaminan dari pemerintah bahwa peminjam maupun pemberi pinjaman yang terhubung secara politik akan diberikan dana *bailout* saat keduanya mengalami krisis keuangan. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Mamlu & Ramdany, 2019).

Berdasarkan teori keagenan petinggi perusahaan selaku principal yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau partai politik berusaha untuk mendapatkan kepercayaan lebih bahwa perusahaan yang dipimpinnya selalu mematuhi peraturan dan regulasi pajak yang di berikan pemerintah, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi penilaian dari pemerintah terhadap perusahaan. maka dari itu petinggi perusahaan tidak serta merta menggunakan hubungannya dengan pemerintah atau partai politik untuk melakukan penghindaran pajak karena. Akan tetapi manajemen sebagai pihak agen menggunakan hubungan politik tersebut sebagai sumber yang sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terkoneksi perusahaan dengan politik dipercaya dapat menghindari pemeriksaan pajak, sehingga memberikan peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan laba.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,325 lebih besar sama dengan 0,05 selain itu nilai dari  $\beta$  menunjukkan angka negatif yaitu sebesar -0,057. Dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjuka bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak sehingga walaupun perusahaan terindikasi mempunyai hubungan politik dengan pemerintah tidak menjamin perusahaan tersebut memiliki tarif pajak efektif lebih rendah.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fadila (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamlu & Ramdany (2019) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Muhamad Hidayat dan Ramahyandi Mulda, 2019). Entitas asing yang memiliki

saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Investor menanamkan dananya pada sebuah perusahaan tentu berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi. Pemegang saham pengendali asing ini bisa memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang ia inginkan untuk mendapatkan keuntungan.

Teori keagenan menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut *agency conflict*. Manajer sebagai agen akan berupaya untuk membuat laba perusahaan terlihat lebih besar agar kinerja manajer di mata pemilik saham (*principle*) menjadi baik. Dengan demikian, kompensasi yang diterima manajer atas kinerjanya juga akan meningkat. Namun, dengan tingginya laba perusahaan akan pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh para pemegang saham dan terjadi

terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, satu sisi manajer sebagai agen menginginkan peningkatan kompensasi, sementara pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

Hasil pengujian statistik  $t$  menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,225 lebih besar sama dengan 0,05 selain itu nilai dari  $\beta$  menunjukkan angka negative yaitu sebesar 0.029. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dimana semakin besar jumlah saham dengan kepemilikan asing pada perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak dalam meminimalkan biaya pajak, karena investor asing hanya tertarik dengan tingkat pengembalian dividen yang mereka terima dengan menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hairul *et. al.* (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Hidayat & Ramahyandi Mulda (2019) dan Irsalina & Agus Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis statistik menggunakan regresi linear berganda pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Capital Intensity*, Resiko Perusahaan, *Leverage*, Koneksi Politik dan Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  ditolak
2. *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  diterima
3. Resiko Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  ditolak
4. *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  ditolak
5. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  diterima.

6. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sehingga  $H_0$  diterima.

### **Implikasi**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada BEI sebagai media untuk evaluasi dan menambah pemahaman tentang *tax avoidance*.

### **Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena populasi pada penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan properti dan real estate.
2. Terdapat perusahaan yang tidak menampilkan secara terperinci nilai amortisasi pada laporan keuangannya.

### **Saran**

Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi yaitu sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah

sampel perusahaan tidak hanya pada perusahaan property dan real estate tetapi juga sektor lainnya yang ada untuk menambah sampel karena sampel mewakili populasi yang digunakan untuk penelitian, sehingga makin banyak sampel maka semakin meningkat generalisasinya.

2. Untuk mempermudah dalam pencarian instrumen amortisasi untuk pengukuran EBITDA sebaiknya melakukan analisis di CALK sehingga tau secara merinci berapa nilai besaran dari amortisasi, walaupun perusahaan tidak melakukan amortisasi secara jelas sebaiknya tetap melakukan perhitungan dengan menambahkan nilai penyusutan ditambahkan dengan laba sebelum pajak.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Kebijakan publik, koneksi politik, dan tarif pajak yang efektif: Bukti longitudinal dari Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik* , 25 (5), 574-595.

Annuar, HA, Salihu, IA, & Sheikh Obid, SN (2014). Kepemilikan perusahaan, tata kelola, dan penghindaran pajak: Efek interaktif. *Procedia-*

- Sosial dan Ilmu Perilaku*, 164, 150-160.
- Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pengaruh Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pajak Penghindaran. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5 (1), 163-174.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Risiko Korporasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17 (2).
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan pengembalian aset terhadap penghindaran pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5 (2).
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 529-556.
- Dyren, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. "The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance". The Accounting Review, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Fadila, M., Rasuli, M., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pengembalian Aset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Institusi Kepemilikan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015) (Disertasi Doktor, Universitas Riau).
- Hendriksen, E. S., dan M. Breda. 1992. *Accounting Theory*. 5th Edition. USA: Richard D Irwin Inc.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh book tax gap dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dan analisis kebijakan pemerintah terkait penghindaran pajak. *Jurnal dimensi*, 8(3).
- Idzni, IN, & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap

- penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* , 6 (1), 141-152.
- Imam, G. (2011). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* . Bpfe.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. Fisher College of Working Paper, 03-003.
- Marfirah, D. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* , 1 (2), 91-102.
- Martono dan D. Agus Harjito. 2010. *Manajemen Keuangan*. Edisi 4. Jogjakarta: Ekonofisia
- Munawaro, MA, & Ramdany, R. (2019). Csr Peran, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi* , 8 (2), 109-121.
- Octaviana, N. E. 2014. *Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Corporate Social Responsibility : Untuk Menguji Teori Legitimasi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Pohan, CA (2013). *Manajemen Perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama .
- Sabli, Noor (2012). *Tax Planning and Coporate Governancet*.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, L., 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*  
*Edisi 10 Buku 1*. Jakarta :  
Salemba Empat

